

Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia

Yoga Wisnu Prayuda, Johan Arifin

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

E-mail: 22919031@students.uii.ac.id, johan.arifin@uui.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah faktor-faktor yang ada mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusan serta untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan variabel-variabel yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan teorinya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah, leverage, pendapatan asli daerah, dan indeks pembangunan manusia.

Kata kunci: kinerja keuangan, ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk perekonomian dan keuangan. Dalam pandemi ini, pemerintah di seluruh dunia harus mengambil tindakan drastis untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Tindakan lockdown, dan penutupan seluruh bisnis telah menyebabkan gangguan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Penting untuk memahami bagaimana pandemi covid-19 berdampak pada pendapatan dan belanja pemerintah serta situasi keuangan secara keseluruhan. Selain itu, diperlukan analisis yang tepat mengenai langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menghadapi pandemi ini dan bagaimana langkah-langkah tersebut mempengaruhi kesehatan keuangan pemerintah. Motivasi peneliti adalah untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia pasca covid-19.

Laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya bisa dijadikannya sebagai tolok ukur kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir. Namun dalam 2 tahun terakhir kinerja pemerintah berpotensi menurun hal ini dikarenakan wabah covid-19. Laporan keuangan yang buruk berpotensi menyebabkan kinerja keuangan yang buruk. Kinerja keuangan yang buruk akan membuat perekonomian di Indonesia juga akan memburuk menyebabkan inflasi yang ada di Indonesia meningkat. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menstabilkan kinerja keuangan pemerintah adalah dengan cara meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana cadangan.

Berdasarkan isu-isu yang sudah terjadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan menjadi sangat penting bagi tolok ukur pemerintah dalam pengelolaan keuangannya. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun, terdapat beberapa aspek-aspek yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Salah satunya adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar akan membuat pemerintah leluasa dalam menjalankan operasional pemerintahannya. Namun, ukuran pemerintah daerah yang besar akan berdampak pada kompleksitas dalam pengambilan keputusan serta ukuran pemerintahan daerah yang besar akan memberikan risiko terhadap penyalahgunaan dana.

Aspek selanjutnya adalah ukuran legislatif. Ukuran legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat menggunakan dan mengalokasikan dana yang ada agar digunakan sebaik mungkin. Semakin banyak jumlah anggota DPRD maka akan semakin tinggi pula pengawasan anggota DPRD terhadap pemerintah. Namun banyaknya jumlah anggota DPRD akan meningkatkan biaya pemerintahan.

Selanjutnya adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Ketergantungan pemerintah daerah pada pusat akan menyebabkan pemerintah daerah kurang mandiri dan terkesan hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Tingginya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya adalah leverage atau tingkat hutang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan lembaga kreditur demi membantu mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tingkat hutang yang tinggi memberikan sinyal bahwa kurangnya kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangannya.

Pendapatan asli daerah menjadikannya sebagai salah satu fondasi dari pembiayaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingginya PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan membuat pemerintah daerah memberikan pelayanan dan pembangunan ke masyarakat secara luas, namun PAD yang rendah akan membuat pemerintah kesulitan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya meliputi: ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan daerah, leverage, pendapatan asli daerah. Disini peneliti juga menambahkan variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel kontrol terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBENTUKAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori agensi adalah teori ekonomi yang membahas hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan perintah, sedangkan agen merupakan pihak yang menerima perintah dari principal. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling berpendapat bahwa hubungan antara prinsipal dan agen akan menimbulkan konflik kepentingan, hal ini dikarenakan masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Konflik kepentingan yang berkelanjutan dapat menjadi kerugian bagi organisasi seperti biaya agensi yang muncul akibat dari konflik kepentingan. Menurut (Mahdiana dan Amin, 2020) teori agensi mengasumsikan masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen.

Teori agensi digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian kinerja keuangan dikarenakan membahas hubungan antara prinsipal sebagai masyarakat dan agen sebagai pemerintah. Beberapa variabel dapat menggunakan teori agensi sebagai landasan teorinya seperti: ukuran pemerintah daerah yang menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Total aset yang besar di pemerintahan akan membuat pemerintah leluasa memberikan layanan ke masyarakat namun total aset yang besar bisa disalah gunakan oleh pemerintah selaku agen. Lalu ada ukuran legislatif yang menjelaskan bahwa semakin banyak anggota legislatif yang aktif maka dapat meningkatkan pengawasan, namun anggota legislatif yang banyak dapat menimbulkan biaya yang berlebihan.

Selanjutnya adalah tingkat ketergantungan keuangan pemerintah. Teori agensi menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang terlalu bergantung pada pemerintah pusat berpotensi untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat selaku agen. Lalu ada leverage. Teori agensi menjelaskan bahwa leverage dapat berpotensi konflik dikarenakan pemerintah memiliki informasi yang lebih dibandingkan oleh masyarakat. Hal ini berpotensi terjadinya konflik seperti pemerintah daerah yang menggunakan utang yang berlebihan untuk membiayai pengeluarannya. Selanjutnya adalah pendapatan asli daerah. Teori agensi menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang tinggi dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan agen.

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari pengelola keuangan milik negara atau daerah selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan pemerintah juga disusun

berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan keuangan pemerintah sendiri juga terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut (Ariyanto, 2020) laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Sedangkan menurut peraturan pemerintah laporan keuangan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan untuk melihat nilai tingkat efektivitas dari pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Contohnya saja jika pendapatan daerah mengalami peningkatan yang signifikan maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatannya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut (Aladin et al., 2021) kinerja merupakan prestasi kerja yang diterima dalam menjalankan program dalam periode tertentu, sedangkan menurut (Karlinda et al., 2021) kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut (Mahmudi, 2019) tingkat efisiensi dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan cara membandingkan antara input dan output. Semakin tinggi tingkat efisiensi semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah merupakan hasil kerja keras pemerintah dibidang keuangan dalam satu tahun periode akuntansi berjalan. Pencapaian yang telah diraih pemerintah meliputi belanja daerah atau penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat ke pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sendiri akan berdampak pada laporan keuangan yang mana hal tersebut juga akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah apakah menjadi baik atau buruk.

Pembentukan Hipotesis

Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, teori keagenan adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Dalam konteks pemerintah pihak yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah daerah sedangkan untuk prinsipal adalah masyarakat. Aset besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin tinggi aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin mudah pula pemerintah dalam membiayai program-program yang mana hal tersebut akan meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah. Namun, aset yang besar memiliki potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang menyebabkan prinsipal lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Manafe et al., 2023), (Adinata dan Efendi, 2022), (Aladin et al., 2021), (Nurhayati dan Hamzah, 2020), (Siregar, 2020), (Angriani Banunaek et al., 2022), (Karlinda et al., 2021), (Rusmita, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian milik (Sari dan Mustanda, 2019), (Mulyani, S., dan Wibowo, 2017), (Rahma Putri dan Amanah, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut (Manafe et al., 2023) ukuran pemerintah yang besar memberikan akses yang mudah untuk aktivitas operasionalnya sehingga mengefektifkan pemberian layanan ke masyarakat secara layak. Maka dari itu pemerintah yang berukuran besar diharapkan dapat memiliki kinerja keuangan yang lebih baik ketimbang pemerintah daerah yang berukuran kecil. Berdasarkan informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai ukuran pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kinerja

keuangan pemerintah daerah. Menurut (Rusmita, 2019) ukuran pemerintah daerah menggunakan pengukuran total aset dalam neraca di laporan keuangan pemerintah daerah. Dari informasi tersebut teori keagenan dapat digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian. Hal ini dikarenakan semakin tinggi aset yang dimiliki oleh pemerintah maka semakin mudah pula pemerintah daerah dalam memberikan layanan ke masyarakat. Berdasarkan tinjauan teori, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran legislatif merupakan anggota yang dipilih oleh masyarakat guna mewakili suara masyarakat dalam mengelola dan mengeluarkan kebijakan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk melakukan suatu tugas, dan agen menerima mandat dari prinsipal untuk melakukan tugas tersebut. Banyaknya anggota legislatif berdampak baik, hal itu dikarenakan semakin banyak anggota legislatif maka semakin tinggi pula pengawasan kinerja keuangan pemerintah. Menurut (Noviyanti dan Kiswanto, 2016) banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun, banyaknya anggota legislatif akan berpotensi kesulitan dalam pengambilan keputusan hal ini dikarenakan semakin banyak anggota legislatif semakin kompleks pula dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewanti et al., 2022) dan (Gustiantra dan Serly, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan (Noviyanti dan Kiswanto, 2016), (Muhammad Fadel Suqron, 2021), (Karno dan Alliyah, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Dewanti et al., 2022) ukuran pemerintah daerah berkaitan dengan teori keagenan ketika pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan aset untuk kepentingan publik. Dari informasi tersebut teori keagenan dapat digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan semakin banyak anggota DPRD sebagai agen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah sebagai principal. Berdasarkan tinjauan teori, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah merupakan besaran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat ketergantungan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu tingkat ketergantungan yang tinggi akan menyebabkan pemerintah daerah berpotensi untuk memprioritaskan proyek yang diminta oleh pemerintah pusat dibandingkan proyek yang diminta oleh masyarakat. Tingkat ketergantungan yang rendah akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara finansial sehingga pemerintah daerah dapat leluasa dalam mengelola keuangannya bagi masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Setiani dan Ismunawan, 2022) dan (Primadiva et al., 2021).

Menurut (Setiani dan Ismunawan, 2022) tingkat ketergantungan bisa diketahui dari banyaknya dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dari informasi tersebut teori agensi dapat digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semakin rendah tingkat ketergantungan maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila tingkat ketergantungan pemerintah daerah rendah maka mereka memiliki sumber pendapatan yang mandiri seperti pajak dan retribusi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kontrol yang besar atas kebijakan fiskal mereka sendiri. Berdasarkan tinjauan teori, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage adalah kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai proyeknya dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal dan agen. Menurut teori agensi terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini dikarenakan agen memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang prinsipal, sehingga agen dapat mengambil tingkatan yang bisa merugikan prinsipal. Dalam hal ini berpotensi untuk terjadinya konflik seperti pemerintah daerah yang menggunakan utang yang berlebihan untuk membiayai pengeluarannya.

Menurut (Adinata dan Efendi, 2022) leverage adalah hasil perbandingan utang dan modal. Yang mana leverage merupakan jumlah proporsi dari total hutang terhadap ekuitas. Semakin rendah leverage, semakin rendah pula ketergantungan terhadap entitas pada pihak luar. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dan mengalokasikan keuangannya dengan baik. Menurut (Alfi dan Sari, 2023) leverage dapat diukur dengan cara menggunakan debt to equity ratio. Penelitian milik (Alfi dan Sari, 2023), (Siregar, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tinjauan teori, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan asli daerah merupakan hasil pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah tersebut dan digunakan oleh pemerintah dalam membangun daerah otonomnya. PAD yang tinggi di pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan PAD yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut. PAD yang tinggi akan memiliki lebih banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Sari dan Halmawati (2021) PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting dalam pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu dalam meminimalisir ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Sedangkan menurut (Lestari dan Wahyu Hapsari, 2020) PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Penelitian milik Padang dan Padang (2023), Banunaek, et al., (2022), Maulina (2021), Sari dan Halmawati (2021), Antari (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian milik (Pratama et al., 2022), (Ginting et al., 2021), (Lestari dan Wahyu Hapsari, 2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tinjauan teori diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

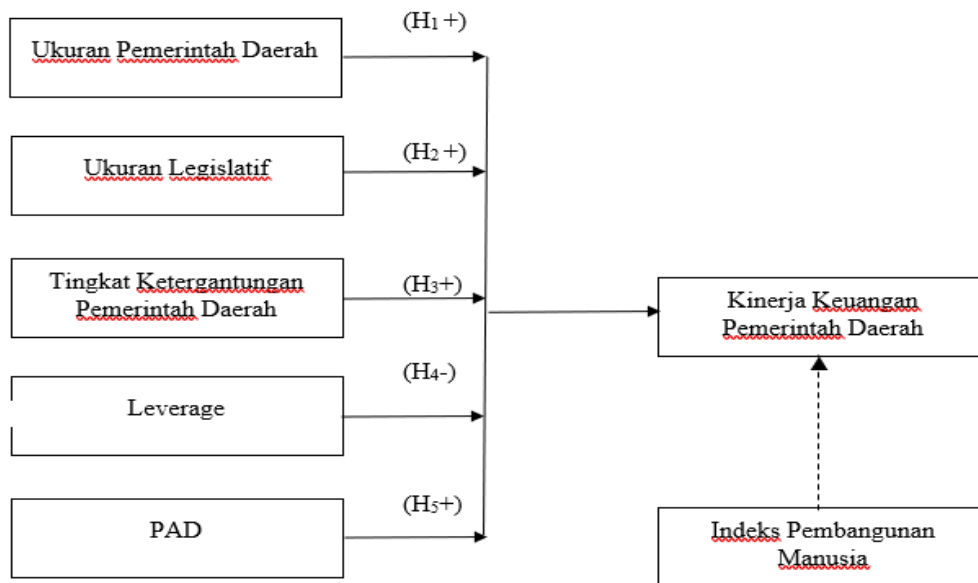
Indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Tingkat IPM yang tinggi dalam suatu daerah menunjukkan bahwa penduduk di daerah tersebut memiliki akses yang baik terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, peningkatan IPM bukan hanya mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Astuti dan Mispriyanti, 2019) indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap fisik maupun yang bersifat non fisik. Indeks pembangunan manusia yang tinggi diharapkan

mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Hal itu dikarenakan IPM yang tinggi masyarakat akan cenderung lebih produktif dan berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa kelemahan-kelemahan sehingga penelitian kinerja keuangan pemerintah menjadi lambat. Diantaranya adalah: pertama kurangnya variabel independen yang merepresentasikan pengaruh pada kinerja keuangan lebih baik, serta penggunaan teori yang dirasa masih belum cukup dalam menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan pada penelitian ini juga peneliti menggunakan objek penelitian di seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti memasukkan indeks pembangunan manusia sebagai variabel control.



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian asosiatif dan pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang akan diteliti penulis dikarenakan akan menguji lima variabel bebas dan satu variabel kontrol. Adapun variabel yang akan diteliti oleh penulis adalah ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan daerah. Sedangkan untuk variabel terikatnya penulis menggunakan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se-Indonesia, peneliti memutuskan menggunakan objek penelitian seluruh Indonesia karena peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah Indonesia secara keseluruhan dan melihat seberapa berhasil program yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah UU No.32 Tahun 2004 yang hanya dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah Indonesia. Penelitian ini sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan berupa data kuantitatif hal ini dikarenakan data yang digunakan menggunakan angka yang akan mewakili variabel-variabel yang digunakan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang mana data tersebut adalah data laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek maupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang mana hal tersebut akan ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang mengeluarkan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari kelompok yang diteliti yang memiliki karakteristik unik dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut. Sampel yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Data sampel yang diambil merupakan 320 laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

PENGUKURAN VARIABEL

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keluangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan:

$$\frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Ukuran Legislatif

Ukuran legislatif merupakan anggota yang dipilih oleh masyarakat guna mewakili suara masyarakat dalam mengelola dan mengeluarkan kebijakan. Ukuran legislatif dapat diukur dengan jumlah anggota DPRD yang aktif.

Tingkat Ketergantungan Keuangan

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah merupakan besaran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\text{tingkat ketergantungan daerah} = \frac{\text{Dana alokasi umum}}{\text{total pendapatan daerah}}$$

Leverage

Leverage adalah kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai proyeknya dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Leverage dapat diukur menggunakan rasio debt to equity ratio:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{ekuitas}} \times 100$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan hasil pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah tersebut dan digunakan oleh pemerintah dalam membangun daerah otonomnya. Pendapatan asli daerah dapat dilihat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengukur apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-smirnov* adalah uji statistik yang membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 maka data dianggap berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berfungsi untuk melihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Satu diantara kriteria untuk mendeteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas pada suatu model adalah: Jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Semakin tinggi VIF, maka semakin rendah *tolerance*.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi apakah data dapat keberagaman atau perbedaan. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda adalah persamaan yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen dari dua atau lebih variabel independen. Bentuk umum dari persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + \dots + \epsilon$$

Penjelasan:

Y = variabel dependen (kinerja keuangan)

a = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, B_5 = koefisien regresi variabel

X_1 = ukuran pemerintah daerah

X_2 = ukuran legislatif

X_3 = tingkat ketergantungan daerah

X_4 = *leverage*

X_5 = pendapatan asli daerah

ϵ = *error*

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau (R^2) merupakan sebuah uji yang mengukur sejauh mana sebuah variabel penelitian menjelaskan variasi dari variabel dependen. Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi dapat memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin baik model regresi tersebut dalam memprediksi variabel dependen.

Uji F

Menurut Chandrarin (2018) Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi linier berganda sudah tepat (*fit*). Uji F bertujuan untuk menguji modal penelitian, apakah model yang telah dibangun dapat memberikan penjelasan yang baik pada variabel dependen. kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka model penelitian dinyatakan layak, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model penelitian dinyatakan tidak layak.

Uji T

Uji t bertujuan untuk menunjukkan bahwa variabel independen dalam memberikan pengaruh variabel dependen. Jika nilai signifikansi (Sig) $<$ probabilitas 0,05 maka dapat dipastikan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig) $>$ probabilitas 0,05 maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat membuat tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan adanya usulan yang mendalam dan rekomendasi berdasarkan data, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan keuangan mereka.

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dan menjadi pengembangan teori dan praktik pengelolaan terikat dengan penelitian kinerja keuangan pemerintah yang ada di Indonesia.

SIMPULAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah akan berpotensi untuk berpengaruh terhadap pelayanan ke masyarakat serta pembangunan infrastruktur di daerah. Kinerja keuangan yang baik diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan yang buruk akan mengakibatkan salah satunya adalah pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan layanan ke masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mana hal tersebut apabila terus terjadi maka akan mengakibatkan menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah hendaknya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang tepat. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

REFERENSI

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–14.
- Aladin, Sarikadarwati, & Safitri, M. D. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada Kab/Kota Prov Sumatera Selatan Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntanika*, 7(2), 195–206.
- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). *Jea* 1,2. 5(3), 1098–1114.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawantahun 2018.

[Https://Journal.Uir.Ac.Id](https://journal.uir.ac.id), 6(1), 1.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/5292/2559>

- Astuti, S., & Mispriyanti, M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi*
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/2096%0Ahttps://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/viewFile/2096/1157>
- Banunaek, I. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1372>
- Dewanti, A. C., Masnila, N., & Aprianti, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. *Akuntanika*, 8(2), 111–116.
- Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017–2022. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 315–320.
- Gustiantra, V., & Serly, V. (2019). Pengaruh good corporate governance dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Yang Terdapat Pada Indonesia Governance Indexs Tahun 2014). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1426–1442.
- Karlinda, A. E., Azizi, P., & Sopali, M. F. (2021). Pengaruh pengalaman kerja, prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karir pada PT. PLN (persero) kota padang rayon kurunji. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Karno, D. K. S., & Alliyah, S. (2021). The Influence Of Local Government Characteristic and BPK Audit Opinion On The Financial Performance Of District/City Governments In Province Jawa tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3(1), 40–55.
- Lestari, E., & Wahyu Hapsari, D. (2020). Pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah (pad), dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018). *The Influence of Capital Expenditure, Local*, 7(2), 2743–2750.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisaksi*, 7(1), 127–138.
- Manafe, H. A., Niha, S. S., & Putra, D. P. S. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan DanaPerimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 4(3), 541–547.
- Mulyani, S., dan Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Pratama, A. B., Maslichah, & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 09(02), 47–57.

- Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.11999>
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3620>
- Rusmita, S. (2019). Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance. *International Research in Economics and Finance*, 3(2), 29. <https://doi.org/10.20849/iref.v3i2.703>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Setiani, I., & Ismunawan. (2022). Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 261–276.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>
- Suqron, M. F. (2021). Pengaruh Long Term Debt To Equity Ratio, Current Ratio Dan Firm Size Terhadap Harga Saham, *Bongaya Journal for Research in Accounting* 1(1), 1–7.